

m *Musāwa*

Jurnal Studi Gender dan Islam

**PROPOSING FEMINIST INTERPRETATION OF THE QUR'AN
AND AFFIRMATIVE POLICY TO SUPPORT WOMEN LEADERSHIP
IN INDONESIAN STATE ISLAMIC HIGHER EDUCATION**

Nina Nurmila

**GENDER EQUALITY AND SOCIAL INCLUSION (GESI)
PADA DUA SEKOLAH INKLUSI DI PONOROGO**
Evi Muafiah, Ayunda Riska Puspita, Vivi Vellanita Wanda Damayanti

**SOLIDARITAS JANDA:
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI PJJJ ARMALAH YOGYAKARTA**
Rohinah

**STATUS HUKUM KHITAN PEREMPUAN
(PERDEBATAN PANDANGAN ULAMA DAN PERMENKES RI
NO.1636/MENKES/PER/XI/2010)**
Triardi Samuel Zacharias, Asnath Niwa Natar

**QANUN JINAYAT AND SHARIA POLICE; A NEW VIOLENCE
IN THE CONTEXT OF GENDER IN ACEH INDONESIA**
Khairul Hasni

in Musāwa

Jurnal Studi Gender dan Islam



Pusat Studi Wanita
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Editor in Chief: Marhumah

Managing Editor: Witriani

Editors:

Alimatul Qibtiyah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Siti Ruhaini Dzuhayatin, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Euis Nurlaelawati UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Mochamad Sodik, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Inayah Rohmaniyah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Masnun Tahir, UIN Mataram, NTB
Dewi Candraningrum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah
Umni Sumbulah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur
Dwi Setyaningsih, UIN Sunan Ampel, Jawa Timur
Nina Nurmila, UIN Sunan Gunung Djati, Jawa Barat
Rachmad Hidayat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Sri Wiyati Eddyono, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Eve Warburton, National University of Singapore, Singapore
Tracy Wright Websters, University of Western Sydney, Australia

Language Editors:

Zusiana Elly Triantini, Fatma Amilia, Muh. Isnanto

TERAKREDITASI:

Nomor: 2/E/KPT/2015, Tanggal 1 Desember 2015

Alamat Penerbit/ Redaksi: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp./ Fax. 0274-550779
Email: pswsuka@yahoo.co.id
Website: psw.uin-suka.ac.id

Musawa adalah Jurnal Studi Gender dan Islam yang fokus pada kajian-kajian gender dan anak, baik yang terintegrasi dengan Islam maupun Hak Asasi Manusia. Diterbitkan pertama kali Maret 2002 oleh Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta bekerja sama dengan Royal Danish Embassy Jakarta. Mulai tahun 2008 terbit dua kali dalam setahun yaitu bulan Januari dan Juli. Mulai tanggal 1 Desember 2015 Jurnal Musawa mendapatkan Akreditasi Nasional Kemristekdikti dengan Nomor: 2/E/KPT/2015

Redaksi menerima tulisan dengan tema Gender, Islam, dan HAM berupa hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan atau diterbitkan di media lain. Artikel ditulis dalam 6.000 - 10.000 kata sesuai dengan gaya selingkung Musawa yang dapat dilihat di halaman belakang. Naskah dikirimkan melalui *Open Journal System* (OJS) Musawa melalui alamat : <http://ejournal.uin-suka.ac.id/musawa>. Editor berhak melakukan penilaian tentang kelayakan suatu artikel baik dari segi isi, informasi, maupun penulisan.

GENDER EQUALITY AND SOCIAL INCLUSION (GESI) PADA DUA SEKOLAH INKLUSI DI PONOROGO

Evi Muafiah, Ayunda Riska Puspita, Vivi Vellanita Wanda Damayanti

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

evimuafiah@iainponorogo.ac.id, puspita@iainponorogo.ac.id, vvelanita@gmail.com

Abstrak

Sekolah Luar Biasa (SLB) yang didirikan untuk membantu Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam mengakses pendidikan, ternyata di sisi lain menjadikan anak-anak ini terkelompokkan berdasar pada kategorisasi kekhususannya, sehingga mereka menjadi eksklusif. Hal ini berbeda dengan pendidikan inklusif yang memberikan kesempatan kepada semua anak untuk belajar bersama-sama di sekolah umum. Kesempatan belajar tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan keragaman dan kebutuhan serta peran gender masing-masing individu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembelajaran bernuansa Gender Equality and Social Inclusion (GESI) di sekolah inklusi di Ponorogo. Analisis difokuskan pada aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pembelajaran di sekolah tersebut. Tahapan penelitian dimulai dari pengumpulan data (observasi, wawancara, dan dokumentasi), analisis data yang meliputi tahapan reduksi data, paparan data dan verifikasi data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembelajaran bernuansa GESI diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran dengan cara memperhatikan kebutuhan dan kemampuan siswa yang beragam terutama pada siswa berkebutuhan khusus dan tanpa membeda-bedakan antara peran laki-laki dan perempuan.

Kata Kunci: Gender Equality, Social Inclusion, Sekolah Inklusi

Abstract

The Special School (SLB), which was established to assist Children with Special Needs (ABK) in accessing education, makes these children were grouped into their specificity to become exclusive. This is different from inclusive education, which provides opportunities for all children to learn together in public schools. These learning opportunities are implemented by considering each individual's diversity and needs and gender roles. This study describes the learning process with Gender Equality and Social Inclusion (GESI) in inclusive schools in Ponorogo. The analysis focuses on access, participation, control, and benefits in learning at the school. The research stages began with data collection (observation, interviews, and documentation), data analysis that included data reduction, data exposure, data verification, and conclusion. The study results that GESI-style learning is applied in learning by paying attention to students' various needs and abilities, especially students with special needs, without differentiating between men's and women's roles.

Keyword: Gender Equality, Social Inclusion, Inclusive School

Pendahuluan

Sekolah Luar Biasa (SLB) telah memisahkan dan mengeksklusifkan anak-anak berkebutuhan khusus dari anak-anak pada umumnya. Pada dasarnya keberadaan sekolah luar biasa merupakan upaya pemerintah untuk menyediakan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai kebutuhan.¹ Namun jumlah SLB tidak sebanyak sekolah reguler dan sangat terbatas serta biasanya sulit diakses bagi mereka yang tinggal jauh dari kota kecamatan atau kabupaten.² Minimnya interaksi antara anak reguler dengan anak berkebutuhan khusus menyebabkan masyarakat menganggap anak-anak dengan kebutuhan khusus sebagai masyarakat yang berbeda dengan mereka. Begitu pula sebaliknya, anak-anak berkebutuhan khusus merasa mereka bukan bagian dari masyarakat sekitar. Hal ini menjadi dasar pentingnya sekolah inklusi yang bisa menjembatani relasi antara kedua kelompok tersebut.³

Perlindungan anak adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴ Pemenuhan hak pendidikan anak, tidak hanya sekedar memberikan kepada anak kesempatan untuk memperoleh pendidikan saja, akan tetapi harus diartikan sebagai salah satu

bentuk penyelenggaraan perlindungan anak.⁵ Perlindungan anak dalam dunia pendidikan ditunjukkan oleh penyelenggara pendidikan, khususnya sekolah, dalam melaksanakan pembelajaran.

Pendidikan inklusif merupakan sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak untuk belajar bersama-sama di sekolah umum. Kesempatan belajar tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan keragaman dan kebutuhan masing-masing individu. Keberadaan pendidikan inklusif ini mendukung adanya pendidikan yang berkeadilan, yaitu pendidikan yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang suku, ras, agama dan bahkan kelas sosial dan konstruksi sosial.⁶ Pendidikan inklusi juga berusaha mengoptimalkan perkembangan potensi anak serta fokus dalam memberikan akses yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan. Termasuk pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus juga menjadi perhatian pendidikan inklusif.⁷ Kehadiran anak berkebutuhan khusus di sekolah umum harus mendapat perhatian yang lebih dari lembaga penyelenggara pendidikan, hal ini sebagai upaya lembaga pendidikan untuk memberikan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan anak.

Layanan pendidikan bagi mereka yang berkebutuhan khusus hendaknya menggunakan

¹ Indah Permata Darma dan Binahayati Rusyidi, "Pelaksanaan Sekolah Inklusi di Indonesia," *Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 2 (1 Oktober 2015): 225.

² Ery Wati, "Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri 32 Kota Banda Aceh," *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*, Vol. XIV, No. 2 (2014): 369.

³ Jamilah Candra Pratiwi, "Sekolah Inklusi untuk Anak Berkebutuhan Khusus: Tanggapan Terhadap Tantangan Kedepannya," dalam *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan "Meretas Sukses Publikasi Ilmiah Bidang Pendidikan Jurnal Bereputasi"* (Seminar Nasional Pendidikan UNS dan ISPI Jawa Tengah, Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret, 2015), 239.

⁴ "Undang-Undang No. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, Ayat 2," 2002.

⁵ "Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak," 2011.

⁶ Novi Nur Lailisna, "Education for Equality: Equal Rights," *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 14, No. 2 (7 Juli 2015): 116.

⁷ Admila Rosada, *Menjadi Guru Kreatif: Praktik-Praktik Pembelajaran di Sekolah Inklusi* (Yogyakarta: Kanisius, 2018), 22.

pendekatan humanis, bahkan harus mempertimbangkan pemenuhan HAM dan kesetaraan gender.⁸ Bahwa sebenarnya, kesetaraan gender itu adalah hak yang harus dinikmati oleh perempuan dan laki-laki secara bersama-sama.⁹ Pandangan pendekatan humanis tersebut sangat menghargai kesamaan manusia (*equal*) dan kesempatan yang sama besarnya (*equity*) antara manusia satu dengan manusia lainnya untuk mendapatkan pendidikan.¹⁰ Pembelajaran di setiap lembaga pendidikan membutuhkan pengaturan. Salah satu paradigma yang harus dimasukkan dalam pembelajaran yang mengedepankan keadilan dan kesetaraan adalah kesetaraan gender sosial inklusi atau GESI.

Inklusi sosial adalah perluasan dari konsep gender yang makin terbuka. Inklusi sosial adalah upaya menempatkan martabat dan kemandirian individu sebagai modal utama untuk mencapai kualitas hidup yang ideal. GESI atau gender dan inklusi sosial menjadi role model dalam memerangi kesenjangan dan kerentanan sosial.¹¹ Kerangka GESI memberikan perhatian khusus pada kesetaraan gender dan pelibatan kelompok marginal termasuk penyandang disabilitas.¹²

Pembelajaran dengan paradigma GESI untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan pembelajaran untuk semua lapisan masyarakat, yaitu laki-laki, perempuan, cacat, miskin, berbagai suku, berbagai warna kulit, dan status ekonomi. Jika menginginkan terlaksananya pembelajaran gender dan sosial inklusi, maka diperlukan paradigma gender dan sosial inklusi (GSI) dalam manajemen pembelajaran.

Dimasukkannya paradigma GSI dalam manajemen pembelajaran (perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan) akan mendukung terwujudnya proses pembelajaran yang inklusif yang responsif gender juga.¹³

Sekolah inklusi di Ponorogo saat ini mulai berkembang di antaranya SD Immersion dan SDIT Qurrota A'yun. Lembaga pendidikan tersebut merupakan lembaga pendidikan umum tingkat dasar yang mempunyai beberapa siswa berkebutuhan khusus. Proses pembelajaran yang tidak memisahkan antara siswa yang berkebutuhan khusus dengan siswa yang lain menjadi salah satu alasan pentingnya diterapkannya GESI dalam pembelajarannya. Penerapan GESI di sekolah tersebut bertujuan untuk menumbuhkan sikap saling menghormati pada diri siswa dan menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman yang ada di masyarakat sebagai bagian dari keberlangsungan kehidupan bermasyarakat.

Penelitian ini bertujuan melihat eksistensi sekolah inklusi dilihat dari akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang dapat diperoleh oleh seluruh siswanya. Sekolah inklusi yang dipilih adalah sekolah inklusi tingkat dasar sebagai tingkat awal yang sangat tepat untuk diterapkannya *gender equality and social inclusion*. Aspek kesetaraan dan keadilan gender sosial meliputi empat hal, yakni akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Akses berkaitan dengan kesamaan kesempatan dalam mendapatkan hak-hak dasar. Partisipasi merupakan pelibatan yang seimbang dalam memperoleh sumber daya. Kontrol berkaitan dengan keterlibatan dalam pengambilan

⁸ Mahmud Arif, "Islam Humanis, Ham, dan Humanisasi Pendidikan: Eksposisi Integratif Prinsip Dasar Islam, Kebebasan Beragama, Kesetaraan Gender, dan Pendidikan Humanis," *Musâwa*, Vol. 15, No. 2 (Juli 2016): 239.

⁹ Wewen Kusumi Rahayu, "Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah)," *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2016): 103.

¹⁰ Dadang Garnida, *Pengantar Pendidikan Inklusif* (Bandung: Refika Aditama, 2015), 44.

¹¹ Indra Kertati, "Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Semarang," *Jurnal Riptek*, Vol. 13, No. 1 (Agustus 2019): 59.

¹² Dinar Dwi Prasetyo dkk., "Draf Laporan Penelitian 'Analisis Kontekstual/ Penelitian Formatif Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI) untuk Program Water for Women (WfW) Plan Internasional'" (The SMERU Research Institute, 2019), 1.

¹³ Mudawwamah dkk., "GSI dalam Manajemen Pembelajaran," dalam *Panduan Pelatihan Inklusi Gender dan Sosial* (Surabaya: LAPIS PGMI-IAIN Sunan Ampel, 2009), 104.

keputusan. Manfaat berkaitan dengan keterjangkauan untuk mendapatkan hasil yang sama dari pembangunan.¹⁴

Terdapat beberapa kajian yang berkaitan dengan GESI dan sekolah inklusi. Beberapa diantaranya adalah kajian yang dilakukan oleh Sigit Priatmoko dengan judul Strategi Implementasi Pembelajaran Inklusif Gender di Madrasah Ibtidaiyah. Kajian itu menyatakan bahwa Madrasah Ibtidaiyah sebagai lembaga pendidikan dasar yang mewakili Islam diklaim mampu mengorganisir keadilan pendidikan dan tidak diskriminatif dengan menerapkan pembelajaran inklusif gender, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi pembelajaran harus memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan gender.¹⁵

Sedangkan Yayah Chanafiah melakukan penelitian pengembangan pembelajaran dengan judul Pengembangan Model Pembelajaran Responsif Gender yang Inovatif pada Jenjang Pendidikan Dasar di Provinsi Bengkulu. Penelitian ini menunjukkan bahwa materi pokok Bahasa dan Sastra Indonesia dan Pendidikan Kewarganegaraan yang disampaikan pada buku ajar di Provinsi Bengkulu belum mencerminkan materi yang responsif gender, penanaman nilai budaya di keluarga menyebabkan pemahamannya berdasarkan sangat bias gender, pandangan guru dan siswa terhadap tanggung jawab dan fungsi laki-laki dan perempuan masih konvensional dan cenderung bias gender, dan buku Bahasa dan Sastra Indonesia dan Pendidikan Kewarganegaraan kurang mengapresiasi

kebutuhan, pengalaman dan kesempatan yang setara antara laki-laki dan perempuan sehingga perlu adanya kasus seperti ini maka diperlukan perbaikan silabus.¹⁶

Berbeda pula dengan Reni Ariastuti dan Vitri Dyah Herawati yang meneliti tentang Optimalisasi Peran Sekolah Inklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap warga Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Salah satu sekolah yang dapat dijadikan rujukan informasi sekolah inklusif di Surakarta adalah SD Lazuardi Kamila. Keberadaan sekolah ini mampu memfasilitasi sekolah-sekolah inklusi lainnya untuk mengoptimalkan pendidikan inklusi agar lebih berkembang dan dapat memperbaiki diri.¹⁷

Kajian berikutnya adalah penelitian Nissa Tarnoto dengan judul Permasalahan-Permasalahan yang Dihadapi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi Pada Tingkat SD.¹⁸ Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif ini menunjukkan hasil bahwa terdapat berbagai permasalahan yang ditemui guru terkait kesiapan sekolah inklusi, antara lain kurangnya kompetensi guru dalam menghadapi siswa ABK, kurangnya kepedulian orang tua terhadap ABK, selain itu banyaknya siswa ABK dalam satu kelas, dan kurangnya kerja sama dari berbagai pihak seperti masyarakat, ahli profesional dan pemerintah.

Kajian tersebut telah membuktikan bahwa pendidikan yang responsif gender dan pendidikan inklusi sangat perlu dilakukan dan diterapkan secara masif untuk pemenuhan hak anak dalam

¹⁴ Chalimatus Sa'diyah, dkk., "Dimensi GSI dalam Manajemen Pendidikan," dalam *Panduan Pelatihan Inklusi Gender dan Sosial* (Surabaya: LAPIS PGMI-IAIN Sunan Ampel, 2009), 68.

¹⁵ Sigit Priatmoko, "Strategi Implementasi Pembelajaran Inklusif Gender Di Madrasah Ibtidaiyah," *PROCEEDING: The 3rd Annual International Conference on Islamic Education*, vol. 3 (2018), 244–57.

¹⁶ Yayah Chanafiah, dkk., *Pengembangan Model Pembelajaran Responsif Gender yang Inovatif pada Jenjang Pendidikan Dasar di Propinsi Bengkulu*

dengan sistem "ICT" (Information and Communication Technology) (Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2007), <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=361720>.

¹⁷ Reni Ariastuti dan Vitri Dyah Herawati, "Optimalisasi Peran Sekolah Inklusi," *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* Vol. 1, No. 1 (5 Desember 2016): 38–47, <https://doi.org/10.30653/002.201611.7>.

¹⁸ Nissa Tarnoto, "Permasalahan-Permasalahan yang Dihadapi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi Pada Tingkat SD," *Jurnal HUMANITAS*, Vol. 13, No. 1 (Februari 2016): 50–61.

pelayanan pendidikan. Hasil kajian tersebut merupakan referensi dalam melakukan kajian ini dan kajian lainnya. Selain itu juga memberikan gambaran awal terhadap analisis tentang kesetaraan gender dan inklusi sosial di dunia pendidikan. Kajian ini juga membahas tentang kesetaraan gender dan inklusi sosial, namun dilihat dari aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang diterapkan dalam pembelajaran di sekolah inklusi. Sekolah inklusi memiliki siswa yang heterogen, sehingga kesetaraan gender dan inklusi sosial sangat penting untuk diterapkan dalam pembelajaran.

Tulisan ini merupakan hasil kajian penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus atau sering disebut *case study*. Penelitian studi kasus ini bertujuan untuk mengenal secara mendalam tentang latar belakang dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu sesuai dengan kenyataannya. Subjek penelitian studi kasus dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat.¹⁹ Penelitian ini dilakukan di sekolah inklusi yang ada di Ponorogo, yaitu SDIT Qurrota A'yun dan SD Immersion. Kedua sekolah ini dipilih karena merupakan lembaga sekolah yang menerapkan pembelajaran bernuansa *GESI* dengan memperhatikan kesetaraan semua siswa yang heterogen di sekolah tersebut. Sekolah inklusi adalah sekolah umum atau sekolah reguler yang memiliki siswa dengan latar belakang yang beragam, meliputi latar belakang gender, keluarga, ekonomi, dan budaya setiap anak yang tidak sama, serta memiliki siswa yang berkebutuhan khusus.

Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul adalah data tentang akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembelajaran

yang dapat dialami oleh para siswa di lembaga atau sekolah inklusi. Data-data tersebut untuk selanjutnya dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

SDIT Qurrota A'yun Ponorogo dan ISU GESI

Pendekatan GESI difokuskan pada penyampaian hak yang sama, peluang, dan layanan utama bagi semua warga negara dan kesejahteraan bagi yang membutuhkan. Pendekatan ini juga mengakui lembaga formal dan informal dalam kaitannya dengan hubungan kekuasaan yang melumpuhkan perempuan, orang miskin, yang rentan dan yang tersisih.²⁰ Dalam pelaksanaan pembelajaran, khususnya di sekolah inklusi, pendekatan GESI ini fokus pada hak yang sama, peluang, dan layanan utama bagi semua siswa. Kebutuhan semua siswa sangat diperhatikan, baik itu siswa tanpa memandang kondisi sosial, ekonomi, dan fisik.

Dalam analisis gender terdapat empat faktor yaitu, akses, manfaat, partisipasi dan penguasaan (kontrol) yang berpotensi menimbulkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki baik sebagai objek maupun sebagai subjek pembangunan. Analisis tentang akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam kajian gender sebenarnya tidak bisa dipisahkan satu sama lain.²¹ Keempat faktor ini merupakan satu kesatuan dalam analisis kesetaraan. Dengan menganalisis salah satu aspek, ada kemungkinan aspek lain juga akan muncul secara bersamaan. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa inklusi sosial adalah perluasan dari konsep gender yang makin terbuka, maka analisis keempat aspek ini juga dapat diterapkan dalam menganalisis penerapan GESI dalam pembelajaran.

¹⁹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 55.

²⁰ GESI Working Group, *A Common Framework for Gender Equality and Social Inclusion* (Nepal: Gender Equality and Social Inclusion Working Group, International Development Partners Group, 2017), 3.

²¹ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, *Gender Analysis Pathway (GAP): Alat Analisis Gender untuk Perencanaan Pembangunan* (Jakarta: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2008), 3.

Akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu. Mempertimbangkan cara memperoleh akses yang adil dan setara antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan laki-laki terhadap sumber daya yang akan dibuat.²² Akses mempertanyakan apakah perencanaan pembangunan yang dikembangkan telah mempertimbangkan untuk memberi akses yang adil dalam memanfaatkan/memperoleh sumber-sumber daya pembangunan.²³ Akses ini nanti yang akan mengantarkan pada kesetaraan semua pihak dalam berpartisipasi, mengontrol, dan memberi manfaat pada program yang akan dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan pembelajaran, SDIT Qurrota A'yun memperhatikan faktor akses dalam praktiknya. Berikut dipaparkan oleh guru kelas tentang proses pelaksanaan pembelajarannya.

“Proses pembelajaran siswa inklusi berada bersama-sama dengan siswa reguler dalam satu kelas. Hanya pada kondisi tertentu siswa bisa diajak untuk meninggalkan kelas.”²⁴

Proses pembelajaran dilaksanakan secara bersamaan untuk memberikan akses yang sama kepada semua siswa baik yang reguler maupun yang berkebutuhan khusus begitu juga dengan siswa laki-laki dan perempuan. Selain dijadikan dalam kelas yang sama, semua siswa baik reguler maupun berkebutuhan khusus dan laki-laki maupun perempuan juga diberi akses yang sama dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas.

Dalam memilih kegiatan ekstrakurikuler semua siswa di SDIT Qurrota A'yun diberi akses yang sama untuk mengikutinya. Hal ini dibuktikan dengan adanya angket yang bisa diisi sendiri oleh siswa dengan pertimbangan orang tua, seperti yang disampaikan pada hasil wawancara

tersebut. Orang tua juga dilibatkan dalam pemilihan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi akses orang tua atau wali murid untuk mengetahui kegiatan anaknya di sekolah juga diperhatikan oleh sekolah, seperti yang tertuang dalam hasil wawancara berikut.

“Kegiatan ekstrakurikuler pemberitahuannya ada *online* dan *offline*, untuk pemberitahuan yang memerlukan persetujuan dan tanda tangan orang tua, maka surat ditiptkan ke siswa untuk disampaikan ke orang tua. Untuk ekskul ada yang wajib dan ada pilihan. Untuk yang pilihan biasanya membutuhkan persetujuan orang tua. Anak diberikan kebebasan dalam memilih satu kegiatan ekskul dan anak harus bertanggung jawab terhadap pilihannya dan ada batasan untuk mengikuti kegiatan tersebut misal 1 tahun yang akan menjadi komitmen anak dan orang tua.”²⁵

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa sekolah inklusi Ponorogo tidak membatasi akses siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Informasi tentang kegiatan ekstrakurikuler disampaikan oleh pihak sekolah kepada seluruh siswa, baik laki-laki maupun perempuan dan reguler maupun berkebutuhan khusus. Selain ekstrakurikuler wajib, siswa diberi kebebasan untuk ikut dalam ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Setelah semua siswa mendapatkan informasi dan berhak memilih apa pun ekstrakurikuler yang akan diikuti, siswa melakukan konsultasi dengan orang tua untuk memilih ekstrakurikuler yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa.

Dalam pelaksanaan pembelajaran, pihak sekolah dan siswa juga memerlukan fasilitas untuk mendukung terlaksananya pembelajaran yang kondusif. Fasilitas yang tersedia di sekolah inklusi ini dapat diakses oleh semua siswa baik yang reguler maupun yang berkebutuhan khusus dan baik laki-laki maupun perempuan. Berikut

²² Tino Yosepyn, Sri Purwani, dan Nala Diradametha, *Seri Modul Penguatan Organisasi Masyarakat Sipil pada Sektor Infrastruktur (Modul 1: Pengarusutamaan GESI pada Sektor Infrastruktur)* (Jakarta: Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT), 2019), 3.

²³ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, *Gender Analysis Pathway (GAP): Alat Analisis Gender untuk Perencanaan Pembangunan*, 3.

²⁴ GKIT, *Wawancara*, 4 Maret 2020

²⁵ KSQ, *Wawancara*, 4 Maret 2020

penjelasan kepala sekolah tentang pengadaan dan penggunaan fasilitas yang ada di sekolah.

“Fasilitas khusus untuk ABK itu ada ruang ke-BK-an, ruangan khusus untuk terapi individual. Fasilitas khusus siswa reguler yang tidak bisa diakses siswa berkebutuhan khusus tidak ada. Siswa ABK di kita tidak ada masalah secara motorik jadi bisa menggunakan semua fasilitas, mereka hanya bermasalah dalam keterlambatan belajar, secara intelektual. Sehingga semua tempat bisa diakses oleh anak ini. Fasilitas yang membedakan laki-laki dan perempuan itu ada pada penyediaan kamar mandi, tempat wudhu, kayaknya itu aja ya, kalau yang lain bangku kelas. tapi biasanya itu blok utara perempuan dan blok selatan itu laki-laki, tapi masih dalam satu kelas.”²⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa SDIT Qurrota A'yun tidak memberi batasan kepada semua siswa baik yang reguler maupun yang berkebutuhan khusus dan baik yang laki-laki maupun perempuan untuk aktif dalam proses pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Adanya akses yang sama tersebut juga membuat seluruh siswa di SDIT Qurrota A'yun juga memiliki partisipasi yang sama dalam pelaksanaan pembelajaran dan ekstra kurikuler.

Partisipasi berkaitan dengan keikutsertaan/suara masyarakat, terutama kelompok perempuan atau suara perempuan (dalam hal aspirasi, pengalaman, kebutuhan) dipertimbangkan dan terakomodasi dalam proses perencanaan pembangunan. Pada umumnya perempuan atau suara perempuan kurang atau bahkan tidak terwakili karena kendala peran gendernya.²⁷ Dalam pembelajaran bernuansa GESI partisipasi tidak hanya berkaitan dengan laki-laki dan perempuan tetapi juga dengan siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus. Dalam analisis ini partisipasi yang dikaji adalah partisipasi siswa dalam pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas dan di luar kelas.

Berdasarkan data yang disampaikan di atas diketahui bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas yang tidak dipisahkan menunjukkan bahwa semua siswa dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Semua siswa di SDIT Qurrota A'yun juga dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Namun, partisipasi siswa tersebut tentunya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa.

Partisipasi siswa di dalam kelas juga mendapat kesempatan yang sama. Misal, dalam kelas siswa memiliki kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat, hanya saja untuk siswa berkebutuhan khusus ada kendala dalam kemampuan menyampaikan pendapat mereka. Untuk mengatasi hal tersebut siswa berkebutuhan khusus didampingi oleh guru pendamping khusus (GPK) yang akan membantu siswanya dalam menyampaikan pendapat. Guru pendamping khusus bukanlah pembantu siswa, namun mereka adalah penerjemah dan pembimbing khusus yang akan mengarahkan siswanya untuk mencapai tujuan pembelajaran.

SDIT Qurrota A'yun juga memperhatikan adanya kontrol dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pembelajaran. Kontrol adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini apakah pemegang jabatan sebagai pengambil keputusan didominasi oleh gender tertentu atau tidak.²⁸ Perencanaan kebijakan program kegiatan pembangunan memberikan kontrol (penguasaan) yang setara terhadap sumber-sumber daya pembangunan (informasi, pengetahuan, kredit, dan sumber daya lainnya) bagi perempuan dan laki-laki,

²⁶ Ibid

²⁷ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, *Gender Analysis Pathway (GAP): Alat Analisis Gender untuk Perencanaan Pembangunan*, 4.

²⁸ Tino Yosepyn, Sri Purwani, dan Nala Diradametha, *Seri Modul Penguatan Organisasi Masyarakat Sipil pada Sektor Infrastruktur (Modul 1: Pengarusutamaan GESI pada Sektor Infrastruktur)*, 3.

normal dan berkebutuhan khusus.²⁹ SDIT Qurrota A'yun sangat memperhatikan kontrol dari pihak siswa, khususnya orang tua siswa. SDIT Qurrota A'yun tidak membatasi pihak luar, khususnya orang tua, untuk mengontrol pelaksanaan pembelajaran. Hal ini terlihat pada pemilihan ekstrakurikuler yang melibatkan orang tua siswa untuk memperhatikan kebutuhan dan kemampuan siswa.

Pada perencanaan pembelajaran SDIT Qurrota A'yun memperhatikan kebermanfaatan yang akan diperoleh semua siswanya baik siswa laki-laki maupun perempuan dan reguler maupun berkebutuhan khusus. Manfaat adalah kegunaan yang dapat dinikmati secara optimal. Keputusan yang diambil oleh institusi, kelompok tertentu atau posisi tertentu apakah memberikan manfaat yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki dan penyandang disabilitas atau tidak.³⁰ Faktor manfaat berkaitan dengan perencanaan pembangunan yang dikembangkan ditujukan untuk memberi manfaat bagi perempuan dan laki-laki.³¹ Berikut dijelaskan pertimbangan yang diambil sekolah dalam menentukan perencanaan pembelajaran di sekolah inklusi.

“Perencanaan pembelajaran untuk sementara baru membedakan reguler dan ABK, sedangkan kepentingan siswa laki-laki dan perempuan dimasukkan dalam kegiatan pembelajaran pembiasaan. Faktor utamanya adalah kondisi siswa.”³²

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa SDIT Qurrota A'yun sangat memperhatikan kondisi siswa. Setiap siswa dengan kondisi tertentu tidak bisa jika diperlakukan sama. Perhatian pihak sekolah terhadap kondisi siswa dalam perencanaan

pembelajaran ini merupakan bentuk perhatian sekolah terhadap nilai kebermanfaatan pembelajaran untuk semua siswa baik laki-laki maupun perempuan dan reguler maupun berkebutuhan khusus.

Selanjutnya pada kegiatan evaluasi pembelajaran, SDIT Qurrota A'yun juga memperhatikan nilai kebermanfaatannya untuk seluruh siswa baik siswa laki-laki maupun perempuan dan reguler maupun berkebutuhan khusus. Berikut penjelasan dari pihak sekolah tentang penyusunan dan pelaksanaan evaluasi pembelajaran di SDIT Qurrota A'yun.

“Evaluasi dalam soal baik lisan, tulis ataupun unjuk kerja yang disusun sesuai dengan kemampuannya.”³³

Kemampuan siswa yang tidak sama membuat evaluasi untuk siswa pun dirancang sesuai dengan kebutuhan siswa. Tidak mungkin disamakan evaluasi antara siswa reguler dengan siswa berkebutuhan khusus. SDIT Qurrota A'yun merancang evaluasi pembelajaran dengan memperhatikan nilai kebermanfaatan evaluasi pembelajaran dengan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa.

Pembelajaran di SDIT Qurrota A'yun Ponorogo sangat memperhatikan kondisi siswa. Pertimbangan kondisi siswa menjadikan sekolah inklusi ini sangat memperhatikan kebermanfaatan dalam pelaksanaan pembelajaran. Sekolah tidak akan memaksakan pembelajaran yang siswanya tidak akan mampu mengikutinya karena pembelajaran yang memaksakan kepentingan pribadi bukan kepentingan masing-masing siswanya akan menyebabkan kesia-siaan.

²⁹ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, *Gender Analysis Pathway (GAP): Alat Analisis Gender untuk Perencanaan Pembangunan*, 4.

³⁰ Tino Yosepyn, Sri Purwani, dan Nala Diradametha, *Seri Modul Penguatan Organisasi Masyarakat Sipil pada Sektor Infrastruktur (Modul 1: Pengarusutamaan GESI pada Sektor Infrastruktur)*, 3.

³¹ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, *Gender Analysis Pathway (GAP): Alat Analisis Gender untuk Perencanaan Pembangunan*, 4.

³² GKQ, *Wawancara*, 4 Maret 2020

³³ GKQ, *Wawancara*, 4 Maret 2020

SD Immersion Ponorogo sebagai sekolah GESI unggulan di Ponorogo

Dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah, diperlukan beberapa tahap. Tahap pertama sebelum pembelajaran dilaksanakan adalah penyusunan kurikulum. Dalam pelaksanaan pembelajaran terdapat tiga tahapan utama, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran juga didukung dengan adanya fasilitas yang telah direncanakan dan dibangun melalui proses perencanaan yang matang. Selain pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas, sekolah inklusi juga melaksanakan pembelajaran di luar kelas, yakni ekstrakurikuler.

Tahap awal penyusunan perencanaan pembelajaran di SD Immersion Ponorogo dimulai dari observasi. Bentuk observasi yang dilakukan memang berbeda, namun tujuannya adalah sama yaitu untuk mengetahui kebutuhan siswa mereka, baik siswa laki-laki maupun siswa perempuan dan siswa reguler maupun siswa berkebutuhan khusus.

Observasi dilakukan di awal tahun ajaran baru, khususnya untuk siswa kelas 1 yang baru masuk. Hasil observasi ini nanti dijadikan pijakan untuk menentukan arah pembelajaran selanjutnya. Observasi awal ini dilakukan oleh pihak sekolah dan bekerja sama dengan psikolog dan orang tua. Hasil observasi awal tersebut dikembangkan oleh pihak sekolah menjadi perangkat pembelajaran untuk siswa reguler dan untuk siswa berkebutuhan khusus. Jadi, diketahui bahwa masing-masing pihak yang dapat mengakses penyusunan perencanaan pembelajaran berpartisipasi aktif dalam penyusunan kurikulum.

Dalam perencanaan pembelajaran, sekolah inklusi melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan kurikulum, seperti yang disampaikan wali kelas di sekolah inklusi sebagai berikut.

“Beberapa yang terlibat dalam perencanaan pembelajaran dan juga penyusunan kurikulum

sekolah inklusi adalah pengawas sekolah, kepala sekolah, guru kelas atau guru mapel, dan guru pembimbing khusus (GPK).”³⁴

Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan perencanaan pembelajaran adalah pihak internal dan pihak eksternal. Pihak eksternal yang dapat mengakses penyusunan perencanaan pembelajaran adalah pihak-pihak yang dapat berkontribusi untuk berpartisipasi dan mengontrol kebermanfaatan pembelajaran untuk seluruh siswa. Pihak internal selaku pelaksanaan pembelajaran juga memiliki akses yang seluas-luasnya dalam penyusunan perencanaan pembelajaran karena pelaksana yang akan banyak berinteraksi dengan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran.

Proses pembelajaran dilaksanakan secara bersamaan untuk memberikan akses yang sama kepada semua siswa baik yang reguler maupun yang berkebutuhan khusus begitu juga dengan siswa laki-laki dan perempuan. Semua siswa baik reguler maupun berkebutuhan khusus dan laki-laki maupun perempuan juga diberi akses yang sama dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Salah satu contohnya adalah dalam bentuk diskusi seperti yang disampaikan oleh guru kelas berikut.

“Kesempatan menyampaikan pendapat dan bertanya antara ABK reguler, laki-laki dan perempuan itu *sami mawon*.”³⁵

Pelaksanaan pembelajaran di SD Immersion dilaksanakan secara bersamaan. Tidak ada perbedaan tempat antara laki-laki maupun perempuan dan reguler maupun berkebutuhan khusus. Semua siswa tersebut memiliki akses yang sama dalam mengikuti pembelajaran. Tidak ada perbedaan jenis kelamin, status sosial, kondisi fisik maupun kemampuan siswa. Semua siswa dianggap memiliki hak yang sama dalam mengikuti pembelajaran.

Selain pembelajaran di dalam kelas, di SD Immersion juga selayaknya sekolah umum lainnya, yaitu ada kegiatan ekstrakurikuler. Semua kegiatan ekstrakurikuler dapat diakses oleh siswa reguler

³⁴ WLKI, *Wawancara*, 3 Maret 2020

³⁵ GKI, *Wawancara*, 3 Maret 2020

maupun berkebutuhan khusus dan laki-laki maupun perempuan, sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh kepala sekolah berikut.

“Untuk ekskul pilihan diberikan angket, sehingga jika ingin ikut harus atas persetujuan orang tua dalam memilih ekskul, setidaknya memilih 1 ekskul, maksimal 3 karena akan ada yang jamnya sama. Untuk yang spesial kembali pada program individu, kalau gambar ya gambar sehingga disesuaikan dengan keadaan/kemampuan anak dan persetujuan orang tua. Dalam pemberian angket, tidak ada perbedaan antara yang spesial dan tidak. Akan tetapi tetap dikomunikasikan dengan orang tua. Sehingga bisa menyesuaikan ekskul yang tepat.”³⁶

Selain konsultasi dengan orang tua, pihak sekolah juga berkomunikasi dengan orang tua berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan di awal tahun ajaran baru. Hasil observasi awal dan konsultasi dengan orang tua tersebut menjadi bentuk kontrol pihak sekolah dan orang tua dalam membimbing siswa untuk memilih ekstrakurikuler yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Pemilihan ekstrakurikuler di SD Immersion ini juga memperhatikan manfaatnya untuk masing-masing siswa.

Meskipun diberi akses sepenuhnya untuk menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, keterbatasan siswa berkebutuhan khusus menjadikannya tidak bisa menggunakan fasilitas tersebut, seperti yang terdapat dalam penjelasan berikut.

“Fasilitas untuk siswa reguler yang tidak bisa diakses oleh siswa berkebutuhan khusus: tidak ada, semuanya bisa. Misalnya alat-alat lab, kan Karena ABK tidak bisa mengaksesnya, karena keterbatasan kemampuannya, maka gurunya membimbing sesuai kemampuan siswanya, kalau ndak bisa ya dicarikan alternatif yang lain.”³⁷

Siswa di SD Immersion juga memiliki program-program khusus. Program khusus ini dibuat berdasarkan perencanaan pembelajaran seperti yang dijelaskan sebelumnya. Program

khusus ini untuk mawadahi kebutuhan siswa, terutama siswa berkebutuhan khusus, sebagaimana wawancara berikut.

“Program khusus untuk siswa inklusi yang melibatkan orang tua adalah Komite Wali Mutiara, khusus untuk wali murid ABK, untuk *sharing* perkembangan anak-anak dengan wali kelas. Program khusus untuk ABK termasuk dalam Program Pembelajaran Individual (PPI) untuk masing-masing siswa ABK.”³⁸

Program khusus ini dirancang khususnya untuk siswa berkebutuhan khusus. Jadi aksesnya terbatas hanya untuk siswa berkebutuhan khusus. Sedangkan siswa reguler juga memiliki program sendiri yang juga bisa diakses secara terbatas oleh siswa berkebutuhan khusus, yaitu seperti program literasi dengan membaca sebelum pembelajaran dimulai. Kegiatan literasi ini dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan program khusus untuk siswa berkebutuhan khusus. Keterbatasan akses ini bukan dikarenakan ada pembatasan dari pihak sekolah, namun disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan sekolah.

Selain pengadaan fasilitas, dan pengadaan program khusus proses pembangunan juga merupakan salah satu aspek yang mendukung jalannya pembelajaran di kelas. Pihak-pihak yang dapat mengakses perencanaan pembangunan di SD Immersion dijelaskan sebagai berikut.

“Pihak yang dilibatkan dalam perencanaan pembangunan adalah yayasan dan orang tua wali melalui rapat komite serta kepala sekolah.”³⁹

Dengan adanya akses yang dapat dilakukan oleh pihak internal dan eksternal dalam perencanaan pembangunan, tentunya sekolah ini telah memperhatikan beberapa kepentingan seluruh siswa yang nantinya akan menggunakan fasilitas hasil pembangunan.

Dalam praktiknya, pelaksanaan pembelajaran di SD Immersion telah memperhatikan kesetaraan akses. Deskripsi

³⁶ KSI, *Wawancara*, 3 Maret 2020

³⁷ KSI, *Wawancara*, 3 Maret 2020

³⁸ Ibid

³⁹ Ibid

tentang akses dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah inklusi yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi bahan penting untuk mendeskripsikan bagaimana pihak-pihak yang dapat mengakses kegiatan pembelajaran di sekolah inklusi tersebut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah inklusi.

Penyusunan perencanaan pembelajaran di SD Immersion melibatkan beberapa pihak internal dan eksternal. Pihak yang berpartisipasi aktif dalam penyusunan perencanaan pembelajaran, selain pihak sekolah dan orang tua juga ada psikolog. Psikolog berpartisipasi aktif dalam menganalisis hasil observasi terhadap siswa. Observasi dilakukan oleh guru untuk mengetahui kondisi siswa sebelum menentukan perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa.

Partisipasi aktif pihak sekolah dalam merencanakan pembelajaran ditunjukkan dalam hasil wawancara berikut.

“Direncanakan, bahkan sampai gini kita kan harus menjalin komunikasi yang baik dengan wali murid, sampai kok anak itu seperti ini, kita telisik, kenapa ini terjadi. Bahkan, mohon maaf, kita sampai begini, kita mencari info, o ternyata orang tuanya sedang apa itu, ada masalah, itu kan berimbas pada anak, kemudian ada yang ternyata *single parent*, itu kan berarti siswa tersebut ternyata kehilangan sosok seorang ayah, nah kita usahakan, o berarti wali kelasnya yang memberikan sosok ayah, wali kelasnya laki-laki atau *shadow teacher*-nya, kalau dulu ada ya, berarti dikasih GPK yang laki-laki untuk memberikan figur ayah.”⁴⁰

Dalam penyusunan perencanaan pembelajaran, pihak sekolah sangat aktif menggali informasi tentang kondisi siswa. Jika kondisi siswa dapat memengaruhi pembelajaran siswa di kelas, pihak sekolah akan mengambil langkah untuk dapat memenuhi kebutuhan siswa agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Seperti yang dicontohkan pada hasil wawancara di atas yaitu penentuan guru pendamping khusus (GPK) untuk siswa. Dalam penentuan GPK, pihak

sekolah sangat memperhatikan kondisi siswa yang memerlukan sosok seorang ayah, sehingga untuk siswa tersebut dipihkan GPK laki-laki untuk melengkapi kebutuhan siswa.

Dalam pelaksanaan pembelajaran, semua siswa dapat berpartisipasi. Baik siswa laki-laki maupun perempuan dan reguler maupun berkebutuhan khusus dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembelajaran. Dengan tidak adanya perbedaan kelas seperti yang disampaikan sebelumnya, partisipasi siswa di dalam kelas semakin tidak dibatasi.

Semua siswa dalam kelas memang dapat berpartisipasi tanpa kecuali, namun ada beberapa kendala yang dialami oleh siswa berkebutuhan khusus. Kendala inilah yang membuat partisipasi siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi menjadi terbatas, sebagaimana hasil wawancara berikut.

“Semuanya kita beri kesempatan walaupun kadang pertanyaannya apa serta jawabannya apa, kita tampung semua pertanyaannya kita. Kita beri apresiasi untuk yang menyampaikan pendapat, bertanya, dan menjawab. Walaupun kadang menjawabnya itu dibantu oleh GPK. Umpama jawabannya kurang jelas, GPK-nya itu memancing siswa untuk menjawab atau memberi jawab, coba yang ini terus dia menirukan, oh itu jawabannya tadi.”⁴¹

Berdasarkan paparan tersebut maka dapat diketahui bahwa semua siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, termasuk siswa berkebutuhan khusus serta tidak membedakan partisipasi siswa perempuan dan laki-laki. Meskipun mereka memiliki keterbatasan, guru dapat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh siswa berkebutuhan khusus. Siswa berkebutuhan khusus juga didampingi oleh GPK untuk membantu dan melatih kemampuan komunikasinya di dalam kelas, khususnya dalam diskusi saat pembelajaran berlangsung.

Dalam kegiatan ekstrakurikuler, seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa tidak ada batasan

⁴⁰ GKI, *Wawancara*, 3 Maret 2020

⁴¹ GPKI, *Wawancara*, 3 Maret 2020

siswa laki-laki dan perempuan serta reguler dan berkebutuhan khusus dalam mengakses kegiatan ekstrakurikuler. Semua siswa diberi kesempatan yang sama namun tetap dengan persetujuan orang tua dan kemampuannya. Dengan adanya akses tersebut, mereka dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti penjelasan hasil wawancara berikut.

“Umpamanya Akbar dan Felis itu ikut kegiatan seni tari, berarti habis itu langsung ke kelompok seni tari. Felis atau yang perempuan kalau di sini *jathil*, kemudian yang Akbar atau laki-laki masuk ke *warok*. Kalau seni tari itu ada kelas bawah sendiri dan kelas atas sendiri, karena itu tadi ada *jathil*, *warok* dan sebagainya. Kemudian untuk yang ABK dan yang reguler tidak dibedakan dalam kegiatan ini. Kami kan sebelumnya sudah melakukan observasi melalui MIR (*Multiple Intelligence Research*) maka wali kelasnya harus paham seperti itu. Misal, Akbar ini siswa yang cerdas, maka kita sarankan ikut ini gitu. Kemudian mereka diberi angket dibawa pulang untuk diisi orang tua, dikumpulkan lagi, nah nanti wali kelas itu mereka oh ini ikut ini, ketika wali kelas loh ini si A ini pintar menggambar kenapa kok ndak ikut ekskul menggambar nanti kita komunikasikan.”⁴²

Partisipasi aktif siswa, guru, orang tua menjadi kunci utama dalam pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Tanpa ada komunikasi di antara ketiganya, pihak sekolah juga akan mengalami kendala dalam mengembangkan kemampuan siswa sesuai dengan kemampuannya.

Berikut ini wawancara yang menunjukkan adanya kontrol dari orang tua dalam kebersamaan anak-anaknya belajar di SD Immersion.

“Komunikasi dengan orang tua intens karena sejak awal kita sudah berkomitmen bahwa orang tua tersebut nitipkan anak ke sini ya tidak pasrah begitu saja, tapi kan harus ada komitmen bermeterai. Harus ada kerja sama karena jamnya lebih banyak dengan orang tua ketika di rumah.”⁴³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, komunikasi antara sekolah dengan orang tua merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pembelajaran di SD Immersion Ponorogo. Harus ada kerja sama antara pihak sekolah dengan orang tua agar tujuan pembelajaran benar-benar terwujud.

Salah satu bentuk kontrol dari pihak sekolah adalah dengan mengadakan evaluasi. Selain evaluasi pada penyusunan kurikulum, sekolah juga melaksanakan evaluasi terhadap proses pembelajaran seperti yang dijelaskan pada hasil wawancara berikut ini.

“Dan selalu ada evaluasi ketika anak itu, kita sudah memasangkan ya, kita sudah pasang kan itu sudah jalan.”⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa sekolah mengontrol kegiatan pembelajaran dengan cara melakukan evaluasi. Evaluasi yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, tentunya adalah faktor terpenuhinya kebutuhan semua siswa dalam pembelajaran.

Dalam analisis ini, dianalisis nilai kebermanfaatan untuk siswa laki-laki dan perempuan serta siswa reguler dan berkebutuhan khusus. Pelaksanaan pembelajaran di SD Immersion juga memperhatikan faktor kebermanfaatan. Seberapa besar manfaat yang diberikan kepada semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan dan reguler maupun berkebutuhan khusus.

Berikut dijelaskan kembali mengenai faktor yang dipertimbangkan dalam perencanaan pembelajaran di sekolah SD Immersion.

“Nanti kita sepakati bersama, nanti bisa digunakan sebagai acuan juga dari rekap medik observasi untuk kurikulum, program khususnya dia itu dilihat dari rekap mediknya. dia kebutuhannya apa, kekurangannya apa kelebihanannya apa. Misalnya dia bermasalah di motorik berarti dia kan misalnya ada KD (Kompetensi Dasar) untuk menulis itu kan jadi dia diturunkan, dia seharusnya ya tidak usah menulis

⁴² GKI, *Wawancara*, 3 Maret 2020

⁴³ KSI, *Wawancara*, 3 Maret 2020

⁴⁴ GKI, *Wawancara*, 3 Maret 2020

dulu, setidaknya dia harus mampu menebali huruf dulu. Dari hasil rekam medik diketahui kekurangannya apa, kelebihanannya apa, terus nanti dilihat kurikulum kita yang standar apa, misalnya untuk kelas 1 itu kan ada KD mengucapkan salam secara lisan, anak yang berkebutuhan khusus di wicara kan berarti harus diadaptasikan, oh berarti kalau wicara ndak bisa, apa ya sebagai gantinya agar dia tahu ini adalah salam. Setidaknya indikatornya bagaimana ya anak ini kan gitu untuk kemampuan wicara.”⁴⁵

Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa sebelum pembelajaran dilaksanakan, dalam perencanaan pembelajaran dilaksanakan observasi. Observasi ini bertujuan untuk menentukan kegiatan pembelajaran selanjutnya yang sesuai untuk siswa. Jadi, nilai kebermanfaatan pelaksanaan pembelajaran di sekolah inklusi sangat diperhatikan. Setiap siswa akan memiliki kegiatan yang berbeda, disesuaikan dengan kebutuhannya. Kompetensi dalam pembelajaran juga diturunkan menjadi indikator yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Jika tidak sesuai dengan kebutuhan siswa, maka pembelajaran tidak memiliki nilai kebermanfaatan.

Setelah merencanakan pembelajaran, dalam pelaksanaan pembelajaran, SD Immersion juga memperhatikan aspek kebermanfaatannya untuk siswa. Berikut salah satu bentuk kebermanfaatan yang diperhatikan oleh SD Immersion dalam pelaksanaan pembelajaran.

“Kita mau ngasih GPK pun juga dilihat dari anaknya, kondisi GPK, GPK ini karakternya seperti ini, GPK itu karakternya seperti ini dan anak ini karakternya seperti ini. Ini sama ini cocok, yang ini lebih ahli di bidang ini, jadi ini sama ini.”⁴⁶

Dalam pelaksanaan pembelajaran, khusus untuk siswa berkebutuhan khusus memerlukan pendampingan khusus dari guru pendamping khusus. Pemilihan guru pendamping khusus (GPK) pun tidak asal memilih tapi juga memperhatikan apakah GPK yang akan diberikan

akan memberikan manfaat kepada siswa atau tidak.

Lebih detail kemampuan yang diperhatikan oleh SD Immersion dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran dijelaskan pada hasil wawancara di bawah ini.

“Karakter anak itu berbeda-beda dan evaluasi juga disesuaikan dengan karakter anak. Ada yang mungkin sudah lancar dalam berbicara akan tetapi menulis belum, tapi kan indikatornya apa siswa bisa menyebutkan berarti kan tidak harus menulis, gitu kan kemudian siswanya menjawab dengan secara lisan, itu juga ada.”⁴⁷

Acuan evaluasi pembelajaran di SD Immersion sebenarnya mengacu pada standar kurikulum yang sama. Namun, SD Immersion menyusun kurikulum berdasarkan kemampuan siswa. SD Immersion memiliki kreativitas yang tinggi dalam mengkreasikan bentuk evaluasi agar evaluasi yang disusun tepat sasaran dan memiliki nilai kebermanfaatan yang tepat untuk semua siswanya.

Pelaksanaan evaluasi di sekolah inklusi juga sangat memperhatikan kemampuan siswanya. Tidak ada pembedaan evaluasi antara siswa laki-laki dan perempuan. Namun, untuk siswa berkebutuhan khusus terdapat perlakuan yang berbeda. Semua kembali disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa. Penyusunan evaluasi di sekolah inklusi ini ada berbagai macam, yaitu 1) disamakan dengan siswa reguler (jika siswa mampu); 2) sebagian disamakan dan sebagian dikreasikan sesuai kemampuan; dan 3) dibuatkan evaluasi tersendiri untuk siswa inklusi. Ketiga jenis evaluasi ini dikembalikan lagi pada kemampuan siswa dan pihak sekolah tidak akan pernah memaksakan siswa untuk menjadi sama dengan yang lainnya.

Tidak hanya terbatas pada pembelajaran di dalam kelas, dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolah inklusi juga memperhatikan kemampuan siswa dalam membimbing siswa serta menentukan pilihan ekstrakurikuler yang sesuai dan bermanfaat

⁴⁵ KSI, *Wawancara*, 3 Maret 2020

⁴⁶ GKI, *Wawancara*, 3 Maret 2020

⁴⁷ GKI, *Wawancara*, 3 Maret 2020

untuk siswa, baik itu siswa laki-laki maupun perempuan dan siswa reguler maupun yang berkebutuhan khusus.

Hasil observasi awal merupakan pijakan yang dijadikan sekolah inklusi untuk membantu siswa dalam menentukan pilihan ekstra kurikuler yang akan diikuti oleh siswa. Seperti yang ditunjukkan pada hasil wawancara di atas, siswa tidak asal dalam menentukan ekstra kurikuler yang akan dipilih. Observasi awal juga dijadikan pijakan awal oleh sekolah untuk menentukan program khusus apa yang akan diberikan pada siswa. Setiap siswa bisa jadi memiliki program khusus yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Dalam pengadaan fasilitas, juga ada beberapa pertimbangan yang dijadikan pijakan oleh pihak sekolah inklusi. Pertimbangan tersebut berkaitan dengan kebermanfaatan yang dapat diperoleh oleh siswa, baik siswa laki-laki maupun perempuan dan reguler maupun berkebutuhan khusus.

Di SD Immersion terdapat berbagai macam karakter siswa dengan kebutuhan yang berbeda pula, sehingga dalam pengadaan fasilitas diperlukan pertimbangan yang matang agar dapat menyasar semua pihak. Berikut disajikan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa sekolah inklusi memperhatikan kebermanfaatan pengadaan fasilitas untuk siswa.

“Fasilitas untuk siswa inklusi berupa media. Katakanlah untuk anak-anak autisme itu kan kelemahannya ada dari hasil rekam mediknya, misalnya kesulitan motorik halus, kita menyediakan sarana berupa media untuk melatih motoriknya, sementara sebatas itu, tetapi ketika kita memerlukan kita menghubungi orang tua untuk terapis terdekat.”⁴⁸

Dalam perencanaan pembangunan, sekolah inklusi juga tidak lupa memperhatikan kebermanfaatannya untuk seluruh siswa baik reguler maupun berkebutuhan khusus dan laki-

laki maupun perempuan. Berikut ini dijelaskan oleh pihak sekolah pertimbangan yang dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan di sekolah inklusi.

“Biasanya memperhatikan kemudahan untuk anak-anak. Misalnya sarana bermain tidak mungkin saya tempatkan di depan, kan jalan raya. Kami lebih mementingkan kepentingan anak sebenarnya.”⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa faktor utama dalam perencanaan pembangunan adalah kepentingan siswa. Sekolah sangat mengutamakan nilai kebermanfaatan untuk siswanya dengan tidak membedakan kebutuhan antara siswa reguler dan ABK serta siswa perempuan dan laki-laki.

Kesimpulan

Pembelajaran bernuansa GESI diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran di dua sekolah inklusi di Ponorogo SDIT Qurrota A'yun dan SD Immersion. Eksistensi pembelajaran bernuansa GESI di dua sekolah inklusi memperlihatkan analisis akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pelaksanaan pembelajaran di sekolah inklusi Kabupaten Ponorogo. Sekolah inklusi ini memiliki *branding* dan visi yang berbeda. *Branding* SD Immersion Ponorogo adalah “Sekolah Unggul Berbasis *Multiple Intelligences* Howard Gardner”⁵⁰ dan SDIT Qurrota A'yun adalah “Sekolah Peradaban” atau diartikan sebagai sekolah yang mengunggulkan akhlak dan adab. Sekolah inklusi ini sangat memperhatikan empat aspek analisis akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pelaksanaan. Sekolah inklusi tersebut sangat memanusiakan manusia dan tidak membedakan satu sama lain. Semua berhak mendapat perlakuan yang baik sesuai kebutuhan siswa. Sekolah inklusi ini memperhatikan akses semua siswa tanpa perbedaan. Kontrol dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah inklusi ini

⁴⁸ KSI, *Wawancara*, 3 Maret 2020

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Munif Chatib, *Gurunya Manusia* (Bandung: Kaifa, 2011), 132.

memperhatikan kebutuhan siswa dengan memonitor. Pelaksanaan pembelajaran di sekolah inklusi menyesuaikan siswa dan kemampuan sekolah. Sekolah inklusi belum memiliki fasilitas lengkap.

Daftar Pustaka

- Ariastuti, Reni, dan Vitri Dyah Herawati. "Optimalisasi Peran Sekolah Inklusi." *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, Vol. 1, No. 1 (5 Desember 2016): 38–47. <https://doi.org/10.30653/002.201611.7>.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. *Gender Analysis Pathway (GAP): Alat Analisis Gender untuk Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2008.
- Chalimatus Sa'diyah, Atun Wardatun, dan Lilik Wahyuni. "Dimensi GSI dalam Manajemen Pendidikan." Dalam *Panduan Pelatihan Inklusi Gender dan Sosial*, 59–84. Surabaya: LAPIS PGMI-IAIN Sunan Ampel, 2009.
- Chatib, Munif. *Gurunya Manusia*. Bandung: Kaifa, 2011.
- Darma, Indah Permata, dan Binahayati Rusyidi. "Pelaksanaan Sekolah Inklusi di Indonesia," *Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 2 (1 Oktober 2015): 223–27.
- Ery Wati. "Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri 32 Kota Banda Aceh," *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*, Vol. XIV, No. 2 (2014): 368–78.
- Garnida, Dadang. *Pengantar Pendidikan Inklusif*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- GESI Working Group. *A Common Framework for Gender Equality and Social Inclusion*. Nepal: Gender Equality and Social Inclusion Working Group, International Development Partners Group, 2017.
- Indra Kertati. "Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Semarang," *Jurnal Riptek*, Vol. 13, No. 1 (Agustus 2019): 57–64.
- Lailisna, Novi Nur. "Education for Equality: Equal Rights," *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 14, No. 2 (7 Juli 2015): 113–22.
- Mahmud Arif. "Islam Humanis, Ham, dan Humanisasi Pendidikan: Eksposisi Integratif Prinsip Dasar Islam, Kebebasan Beragama, Kesetaraan Gender, dan Pendidikan Humanis," *Musāwa*, Vol. 15, No. 2 (Juli 2016): 233–47.
- Mudawwamah, Evi Muafiah, Mukhlison Effendi, dan Nurul Yaqin. "GSI dalam Manajemen Pembelajaran." Dalam *Panduan Pelatihan Inklusi Gender dan Sosial*, 104–13. Surabaya: LAPIS PGMI-IAIN Sunan Ampel, 2009.
- Nissa Tarnoto. "Permasalahan-Permasalahan yang Dihadapi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi Pada Tingkat SD," *Jurnal HUMANITAS*, Vol. 13, No. 1 (Februari 2016): 50–61.
- Oleh Yayah Chanafiah, Syukri Hamzah, dan Rokhmat Basuki. Pengembangan Model Pembelajaran Responsif Gender yang Inovatif pada Jenjang Pendidikan Dasar di Propinsi Bengkulu dengan sistem "ICT" (Information and Communication Technology). Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2007. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=361720>.
- "Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak," 2011.
- Prasetyo, Dinar Dwi, Fatin Nuha Astini, Rizki Fillaili, dan Herry Widjanarko. "Draf Laporan Penelitian 'Analisis Kontekstual/ Penelitian Formatif Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI) untuk Program Water for Women (WfW) Plan Internasional.'" The SMERU Research Institute, 2019.
- Pratiwi, Jamilah Candra. "Sekolah Inklusi untuk Anak Berkebutuhan Khusus: Tanggapan Terhadap Tantangan Ke depannya." Dalam *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan "Meretas Sukses Publikasi Ilmiah Bidang Pendidikan Jurnal Bereputasi"*, 237–42. Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret, 2015.

- Priatmoko, Sigit. “Strategi Implementasi Pembelajaran Inklusif Gender Di Madrasah Ibtida’iyah.” Dalam *PROCEEDING: The 3rd Annual International Conference on Islamic Education*, 3:244–57. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah NU Al Hikmah Mojokerto, 2018. <https://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/proceedings/article/view/274>.
- Rosada, Admila. *Menjadi Guru Kreatif: Praktik-Praktik Pembelajaran di Sekolah Inklusi*. Yogyakarta: Kanisius, 2018.
- Sudarwan Danim. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Tino Yosepyn, Sri Purwani, dan Nala Diradametha. *Seri Modul Penguatan Organisasi Masyarakat Sipil pada Sektor Infrastruktur (Modul 1: Pengarusutamaan GESI pada Sektor Infrastruktur)*. Jakarta: Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT), 2019.
- “Undang-Undang No. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, Ayat 2,” 2002.
- Wewen Kusumi Rahayu. “Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah),” *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2016): 93–108.

STANDAR PENULISAN ARTIKEL

NO	BAGIAN	STANDAR PENULISAN
1.	Judul	1) Ditulis dengan huruf kapital. 2) Dicitak tebal (bold).
2.	Penulis	1) Nama penulis dicitak tebal (bold), tidak dengan huruf besar. 2) Setiap artikel harus dilengkapi dengan biodata penulis, ditulis di bawah nama penulis, dicitak miring (<i>italic</i>) semua.
3.	Heading	Penulisan Sub Judul dengan abjad, sub-sub judul dengan angka. Contoh: A. Pendahuluan B. Sejarah Pondok Pesantren... 1. <i>Lokasi Geografis</i> 2. <i>(dst)</i> .
4.	Abstrak	1) Bagian Abstrak tidak masuk dalam sistematika A, B, C, dst. 2) Tulisan Abstrak (Indonesia) atau Abstract (Inggris) atau ملخص (Arab) dicitak tebal (bold), tidak dengan huruf besar. 3) Panjang abstrak (satu bahasa) tidak boleh lebih dari 1 halaman jurnal.
5.	Body Teks	1) Teks diketik 1,5 spasi, 6.000 – 10.000 kata, dengan ukuran kertas A4. 2) Kutipan langsung yang lebih dari 3 baris diketik 1 spasi. 3) Istilah asing (selain bahasa artikel) dicitak miring (<i>italic</i>). 4) Penulisan transliterasi sesuai dengan pedoman transliterasi jurnal Musāwa.

NO	BAGIAN	STANDAR PENULISAN
6.	Footnote	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penulisan: Pengarang, <i>Judul</i> (Kota: Penerbit, tahun), hlm. Contoh: Ira M. Lapidus, <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A. Mas'udi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988), 750. 2) Semua judul buku, dan nama media massa dicetak miring (<i>italic</i>). 3) Judul artikel ditulis dengan tanda kutip (“judul artikel”) dan tidak miring. 4) Tidak menggunakan <i>Op. Cit</i> dan <i>Loc. Cit</i>. 5) Menggunakan <i>Ibid.</i> atau نفسه المرجع (Arab). Dicitak miring (<i>italic</i>). 6) Pengulangan referensi (<i>footnote</i>) ditulis dengan cara: Satu kata dari nama penulis, 1-3 kata judul, nomor halaman. Contoh: Lapidus, <i>Sejarah sosial</i>, 170. 7) Setelah nomor halaman diberi tanda titik. 8) Diketik 1 spasi.
7.	Bibliografi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap artikel harus ada bibliografi dan diletakkan secara terpisah dari halaman body-teks. 2) Kata DAFTAR PUSTAKA (Indonesia), REFERENCES (Inggris), atau مصدر (Arab) ditulis dengan huruf besar dan cetak tebal (bold). 3) Contoh penulisan: Lapidus, Ira M., <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A.M., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988. 4) Diurutkan sesuai dengan urutan alfabet.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam tulisan berbahasa Inggris pada Jurnal *Musāwa* ini adalah literasi model L.C. (*Library of Congress*). Untuk tulisan berbahasa Indonesia, memakai model L.C. dengan beberapa modifikasi.

A. Transliterasi Model L.C.

ح = ḥ	ج = j	ث = th	ت = t	ب = b	ا = -
س = s	ز = z	ر = r	ذ = dh	د = d	خ = kh
ع = ‘	ظ = z̤	ط = ṭ	ض = ḍ	ص = ṣ	ش = sh
م = m	ل = l	ك = k	ق = q	ف = f	غ = gh
	ي = y	ء = ‘	ه = h	و = w	ن = n

Pendek a = i = u =
 Panjang ā = ī = إي ū = أو
 Diftong ay = إي aw = أو

Panjang dengan *tashdid* : iyy = إي ; uww = أو

Ta’marbūtah ditransliterasikan dengan “h” seperti *ahliyyah* = أهلية atau tanpa “h”, seperti *kulliyya* = كلية ; dengan “t” dalam sebuah frasa (*contract phrase*), misalnya *surat al-Ma’idah* sebagaimana bacaannya dan dicetak miring. Contoh, *dhālika-lkitābu la rayba fih* bukan *dhālika al-kitāb la rayb fih*, *yā ayyu-hannās* bukan *yā ayyuha al-nās*, dan seterusnya.

B. Modifikasi (Untuk tulisan Berbahasa Indonesia)

1. Nama orang ditulis biasa dan diindonesiakan tanpa transliterasi. Contoh: As-Syafi’i bukan al-Syāfi’i, dicetak biasa, bukan *italic*.
2. Nama kota sama dengan no. 1. Contoh, Madinah bukan Madīnah; Miṣra menjadi Mesir, Qāhirah menjadi Kairo, Baghdād menjadi Baghdad, dan lain-lain.
3. Istilah asing yang belum masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis seperti aslinya dan dicetak miring (*italic*), bukan garis bawah (*underline*). Contoh: ...*al-qawā’id al-fiqhiyyah*; *Isyrāqiyyah*; *‘urwah al-wusqā*, dan lain sebagainya. Sedangkan istilah asing yang sudah populer dan masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis biasa, tanpa transliterasi. Contoh: Al-Qur’an bukan Al-Qur’ān; Al-Hadis bukan al-Hadīth; Iluminatif bukan illuminatif, perenial bukan perennial, dll.
4. Judul buku ditulis seperti aslinya dan dicetak miring. Huruf pertama pada awal kata dari judul buku tersebut menggunakan huruf kapital, kecuali *al-* yang ada di tengah. Contoh: *Ihyā ‘Ulūm al-Dīn*.

ISSN: 1412-3460



1 4 1 2 3 4 6 7